



Kesehatan Warga Yogya Diasuransikan

Perawatan kesehatan yang ditanggung untuk kelas dua di rumah sakit.

YOGYAKARTA — Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta akan mengasuransikan kesehatan seluruh penduduknya. Untuk ujicoba program tersebut, Pemkot telah menyiapkan anggaran Rp 23 miliar untuk program Jaminan Kesehatan Semesta (JKS) atau *universal coverage*.

Program ini menargetkan sekitar 80 persen dari 441.000 orang penduduk Yogyakarta (miskin maupun kaya) memiliki asuransi kesehatan (Askes) pada 2010. Hal tersebut diutarakan Kepala UPT Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kota Yogyakarta, Hj Kusminatun dalam dialog warga soal evaluasi pelaksanaan program jaminan kesehatan di Yogyakarta. Dialog warga digelar Komisi I DPRD Kota Yogyakarta, di Gedung DPRD Kota Yogyakarta, akhir pekan lalu.

Menurutnya, program tersebut sudah disosialisasikan sejak beberapa waktu lalu. Rencananya program tersebut diujicobakan mulai

Juni nanti, di wilayah Kecamatan Tegalrejo, Danurejan, Umbulharjo, Wirobrajan dan Pakualaman. Sebanyak 3 kecamatan yang disebut pertama memiliki kelurahan yang menjadi tempat pelaksanaan ujicoba program terpadu pengentasan kemiskinan, sedang 2 kecamatan lain dipilih karena memiliki Kelurahan Siaga. Cakupan program di lima kecamatan itu nantinya sekitar 155 ribu orang.

"Dana yang disiapkan untuk pelaksanaan di lima kecamatan pada tahun 2009 ini sebesar Rp 3,4 miliar. Dana sebanyak itu untuk subsidi kepesertaan. Sedangkan yang kita rencanakan untuk anggaran 2010 sebanyak Rp 23 miliar," ujarnya.

Penentuan rencana anggaran sebesar itu, kata dia, berdasar survei kemampuan dan kemauan membayar premi yang dilakukan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Hasil survei menyebutkan kemampuan membayar masyarakat rata-rata Rp 153 ribu per bulan, namun kemauan membayarnya hanya Rp 53 ribu per bulan.

Selanjutnya Pemkot menentukan premi yang dibayar sebesar Rp 5 ribu per jiwa per bulan. Orang mampu diharapkan membayar di atas Rp 5 ribu sesuai kesanggupan,

sedang masyarakat miskin gratis. Hal ini mengingat sekitar 1.000 orang dari 2.250 orang yang dijadikan responden survei, hanya mau membayar premi Rp 2.500 sampai Rp 5 ribu per jiwa per bulan.

Subsidi premi

Kusminatun menjelaskan, premi yang dibayar mestinya antara Rp 12 ribu sampai Rp 14 ribu per jiwa per bulan. Karena masyarakat hanya diwajibkan membayar Rp 5 ribu per jiwa per bulan, maka Pemkot menganggarkan Rp 7 ribu sampai Rp 9 ribu per jiwa per bulan sebagai subsidi untuk pembayaran premi. Jumlah total subsidi Rp 23 miliar untuk 80 persen penduduk.

Biaya rumah sakit yang dicover *universal coverage* belum diputuskan secara pasti. Kemungkinannya perawatan di kelas II dengan paket terbatas. Sebab masyarakat umumnya meminta biaya yang ditanggung adalah perawatan di kelas II.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Yogyakarta Ardiyanto mengatakan, pihaknya saat ini masih mencari pola program yang akan digunakan untuk melaksanakan jaminan kesehatan bagi seluruh warga Yogyakarta tersebut.

turkan Kepada Yth. :

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Positif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 01 Mei 2006

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005